

# SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 2 TAHUN 2012

#### **TENTANG**

## PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG IZIN PEMANFAATAN HASIL HUTAN PADA TANAH MILIK DAN KEBUN RAKYAT

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### **BUPATI BANGKA**,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2003 tentang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan pada Tanah Milik dan Kebun Rakyat berdasarkan hasil klarifikasi Pemerintah melalui Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 188.34/2421/SJ, tanggal 30 Juni 2011 Perihal Klarifikasi Peraturan Daerah peraturan-perundangdinyatakan bertentangan dengan undangan yang lebih tinggi, sehingga harus dihentikan pelaksanaannya mengusulkan serta segera pencabutannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (4) dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka pencabutan terhadap Peraturan Daerah yang dibatalkan oleh Pemerintah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

Memperhatikan: Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 188.34/2421/SJ, tanggal 30 Juni 2011 Perihal Klarifikasi Peraturan Daerah;

## Dengan Persetujuan Bersama

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

## dan

## **BUPATI BANGKA**

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 9** 

TAHUN 2003 TENTANG IZIN PEMANFAATAN HASIL HUTAN

PADA TANAH MILIK DAN KEBUN RAKYAT.

#### Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2003 tentang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Pada Tanah Milik dan Kebun Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2003 Nomor 10 Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat pada tanggal 17 Juli 2012

BUPATI BANGKA, cap/dto YUSRONI YAZID

Diundangkan di Sungailiat pada tanggal 17 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA, cap/dto TARMIZI H. SAAT

### LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2012 NOMOR 2 SERI B

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KABAG HUKUM DAN ORGANISASI,

> Hj. RESTUNEMI, SH PEMBINA TK I NIP. 19650423 199203 2 003